

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Provinsi Jawa Tengah ialah salah satu provinsi yang paling luas di Pulau Jawa. Secara astronomis Provinsi Jawa Tengah terletak pada $5^{\circ} 40' - 8^{\circ} 30'$ Lintang Selatan (LS) dan antara $108^{\circ} 30' - 111^{\circ} 30'$ Bujur Timur (BT) dan termasuk di dalamnya Kepulauan Karimunjawa. Secara geografis Provinsi Jawa Tengah terletak diantara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi Jawa Barat, berbatasan langsung dengan Laut Jawa di wilayah utara dan berbatasan langsung dengan Provinsi DIY dan Samudera Hindia di wilayah selatan. Provinsi Jawa Tengah memiliki wilayah administrasi sebanyak 29 wilayah kabupaten, 6 wilayah kota, 573 wilayah kecamatan, 750 wilayah kelurahan dan 7809 wilayah desa. Memiliki cakupan luas wilayah $32.800,69 \text{ km}^2$ dan memiliki jumlah penduduk sebesar 34.897.757 jiwa¹

Gambar 1.1. Peta Wilayah Administrasi Provinsi Jawa Tengah



Sumber: Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah.²

¹ Kementerian Dalam Negeri, *Profil Daerah*, diakses dari <http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/provinsi/detail/33/jawa-tengah>, pada tanggal 08 February 2017 pukul 05.14

² Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Jawa Tengah, *Layanan Informasi Penataan Ruang Provinsi Jawa Tengah*, diakses dari <http://penataanruangjateng.info/profil-jateng.html>, pada tanggal 08 February 2017 pukul 05.21

Sebagai provinsi yang memiliki cakupan wilayah terluas di Pulau Jawa dan memiliki jumlah penduduk yang besar, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk pemerataan dan peningkatan ekonomi di wilayahnya. Untuk pemerataan dan peningkatan ekonomi di wilayahnya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah harus mampu memaksimalkan segala potensi yang dimilikinya baik pemanfaatan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan investasi.

Pemerintahan Ali Mufiz (Tahun 2006-2007) dan Bibit Waluyo (Tahun 2008-2013) di periode yang berbeda akan tetapi di bawah kepemimpinan kepresidenan yang sama, yakni pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terkait mengenai penanaman modal asing yakni Mengundang investor asing dengan berjanji memperbaiki iklim investasi asing hal ini dapat terlihat pada tahun 2006 di Indonesian Infrastructure Summit, bertujuan untuk mempertemukan antara para investor asing dengan Gubernur di seluruh Indonesia dan untuk mempromosikan potensi provinsi kepada para investor asing, peningkatan kepatuhan dan penerimaan pajak, pemberian jaminan dalam berinvestasi, prosedur yang sederhana, pelayanan yang lancar, merevisi beberapa pajak daerah yang dinilai menghambat investasi, peraturan yang konsisten³, memberikan bantuan insentif bagi masyarakat dan dunia usaha, peningkatan daya saing industri, peningkatan fasilitas perdagangan dan pengamanan industri manufaktur, deregulasi kebijakan ekspor impor untuk mengurangi biaya tinggi, peningkatan transparansi, peningkatan produksi dan distribusi usaha di sektor migas, peningkatan investasi di bidang pertambangan, optimalisasi industri kehutanan.

Realisasi penerimaan pada penanaman modal asing pada masa pemerintahan Ali Mufiz dan Bibit Waluyo mengalami kondisi yang fluktuatif, selain dipengaruhi oleh kebijakan nasional pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tentang penanaman modal asing yang sudah dijelaskan di atas, kondisi perekonomian global yang cenderung lesu memiliki pengaruh yang sangat besar dalam realisasi penanaman modal asing di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Jawa Tengah secara khusus.

³ Dokumen RPJMN 2004-2009, bagian IV.24-6 tentang *Pemantapan Stabilitas Ekonomi Makro*, diakses melalui https://www.bappenas.go.id/files/9814/2099/2543/RPJMN_2004-2009.pdf pada tanggal 20 Mei 2017. Pukul 05.00

Pada pemerintahan Ganjar Pranowo yang dimana setelah satu tahun pemerintahannya terjadi pergantian tongkat kepemimpinan dari Presiden sebelumnya yakni Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden yang terpilih yakni Joko Widodo. Setelah resmi terpilih dan menjadi Presiden Republik Indonesia, Presiden Joko Widodo memberikan perhatian dan fokus yang lebih pada kegiatan penanaman modal asing di Indonesia. Kegiatan penanaman modal asing di masa pemerintahan Joko Widodo bertujuan untuk membiayai sejumlah proyek pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Indonesia.

Berikut beberapa kebijakan penanaman modal asing di masa pemerintahan Joko Widodo, yakni paket kebijakan tersebut diatur tentang kemudahan yang diberikan seperti pemberian layanan cepat dalam bentuk pemberian izin investasi dalam kurun waktu tiga jam di kawasan industri melalui peraturan kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), kemudahan dalam hal pengurusan perizinan (pelayanan perizinan 3 jam) serta perbaikan pelayanan dalam hal sarana dan pra-sarana yang akan menunjang pelaksanaan investasi, peraturan pemerintah mengenai kawasan industri serta peraturan Menteri Keuangan, dan hadirnya Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mempermudah para investor asing berinvestasi di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangan terbarunya, pemerintah baru saja mengeluarkan sebuah kebijakan untuk merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dimana, pada kebijakan baru tersebut pemerintah membuka sektor-sektor yang sebelumnya sengaja diproteksi untuk melindungi sektor industri dalam negeri. Dalam peraturan tentang DNI tersebut, pemerintah membuka sektor-sektor industri tertentu kepada investor dari luar negeri dengan tujuan bahwa sektor-sektor tersebut dapat lebih berkembang dan dapat merangsang pertumbuhan ekonomi nasional secara positif.

Realisasi penerimaan pada penanaman modal asing pada masa pemerintahan Ganjar Pranowo mengalami trend peningkatan yang cukup positif. Hal ini disebabkan oleh beberapa kebijakan yang terkait dengan penanaman modal asing pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo sejalan dengan kebijakan yang telah dibuat oleh Ganjar Pranowo dan kondisi perekonomian global yang membaik.

Sejak era pemerintahan Gubernur Ali Mufiz pemanfaatan investasi asing mulai mendapatkan perhatian tersendiri. Pemanfaatan investasi asing dinilai sangat efektif dan

dapat diandalkan sebagai upaya untuk mensukseskan otonomi daerah. Perkembangan persetujuan penanaman modal asing pada tahun 2006 sebesar 142,39 Juta USD, pada tahun 2007 sebesar 317,17 Juta USD. Perkembangan realisasi investasi pada Penanaman modal asing di tahun 2006 sebesar 385,79 Juta USD dan di tahun 2007 sebesar 106,63 Juta USD.

Pada masa pemerintahan Gubernur Bibit Waluyo, pada tahun 2008 nilai investasi pada penanaman modal asing sebesar Rp. 2,716 Triliun, pada tahun 2009 nilai investasi pada penanaman modal asing sebesar Rp. 3,510 Triliun, pada tahun 2010 nilai investasi pada penanaman modal asing sebesar Rp. 8,320 Triliun, pada tahun 2011 nilai investasi pada penanaman modal asing sebesar Rp. 6,414 Triliun dan pada tahun 2012 nilai investasi pada penanaman modal asing sebesar Rp. 2,993 Triliun.

Jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur realisasi nilai investasi asing Provinsi Jawa Tengah masih sangat jauh dan rendah. Provinsi Jawa Barat realisasi nilai investasi asing tahun 2006 sebesar 1.619,30 Juta USD, tahun 2007 sebesar 1.326,90 Juta USD, tahun 2008 sebesar 2.552,20 Juta USD, tahun 2009 sebesar 1.934,40 Juta USD, tahun 2010 sebesar 1.692,00 Juta USD, tahun 2011 sebesar 3.839,40 Juta USD, tahun 2012 sebesar 4.210,70 Juta USD, tahun 2013 sebesar 7.124,90 Juta USD, tahun 2014 sebesar 6.562,00 Juta USD, tahun 2015 sebesar 5.739 Juta USD. Provinsi Jawa Timur realisasi investasi asing tahun 2006 sebesar 384,30 Juta USD, tahun 2007 sebesar 1.689,60 Juta USD, tahun 2008 sebesar 457,10 Juta USD, tahun 2009 sebesar 422,10 Juta USD, tahun 2010 sebesar 1.769,20 Juta USD, tahun 2011 sebesar 1.312,00 Juta USD, tahun 2012 sebesar 2.298,80 Juta USD, tahun 2013 sebesar 3.396,30 Juta USD, tahun 2014 sebesar 1.802,50 Juta USD dan di tahun 2015 sebesar 2.593,00 Juta USD.⁴

Berdasarkan pada data, dapat dilihat bahwa Provinsi Jawa Tengah sangat jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Timur di bidang pemanfaatan penanaman modal asing. Di bawah kepemimpinan Ganjar Pranowo, Provinsi Jawa Tengah benar-benar melakukan pembenahan dan perubahan di semua bidang dari Pemerintahan sebelumnya. Pembenahan dilakukan agar terjadi

⁴ Badan Koordinasi Penanaman Modal, *Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Provinsi Tahun 2006-2015*, diakses dari <https://www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1337> pada tanggal 19 Mei 2017. Pukul 20.00

peningkatan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah. Pembinaan dan perubahan dilakukan baik secara internal maupun eksternal bertujuan untuk menarik perhatian para investor untuk menanamkan modalnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut dapat terlihat dengan semboyan investasi pada masa kepemimpinan Ganjar Pranowo yaitu “*Jawa Tengah tempat yang tepat untuk berinvestasi*”⁵ dan beberapa data yang menunjukkan terjadinya peningkatan penyerapan investasi asing.

Tabel 1.1. Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah (Gubernur Ganjar Pranowo)

Kinerja Ekonomi dan Investasi Jawa Tengah



Indikator Makro Ekonomi Jawa Tengah

NO	INDIKATOR	REALISASI 2013	REALISASI 2014	2015		PROYEKSI 2016	PROYEKSI 2017	PROYEKSI 2018
				TARGET	REALISASI			
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,1	5,3	6,0 – 6,5	5,4	6,1 – 6,6 5,2 – 5,6*	6,2 – 6,7 5,4 – 5,8*	6,2 – 6,7 5,8 – 6,2*
2	Kemiskinan (%)	14,44	13,58	9,05 – 8,75	13,32 (Sept 2015)	8,60 – 8,35	8,25 – 8,00	7,80 – 7,60
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,60	5,68	4,93 – 4,62	4,99 (Agustus 2015)	4,66 – 4,43	4,49 – 4,27	4,32 – 4,20
4	Inflasi (%)	7,99	8,22	5 ± 1	2,73	4,5 ± 1	4,5 ± 1	4,5 ± 1

Keterangan: *) angka proyeksi BI

Central Java Investment Board

4

Sumber: http://dpmpstsp.jatengprov.go.id/assets/uploads/Paparan_Peluang_Investasi_di_Jawa_Tengah

Grafik 1.1 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah (2013-2015)

Kinerja Ekonomi dan Investasi Jawa Tengah

Pertumbuhan Ekonomi



Ekonomi Jawa Tengah tahun 2015 tumbuh 5,4 % meningkat dibanding tahun 2014 (5,3 %) dan tahun 2013 (5,1%)



Industri Pengolahan memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,6%, diikuti Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 0,8%; dan Perdagangan Besar Eceran dan Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 0,6%.



Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 2,7%, diikuti PMTB sebesar 1,5%.

Source : Central Java Statistic Agency

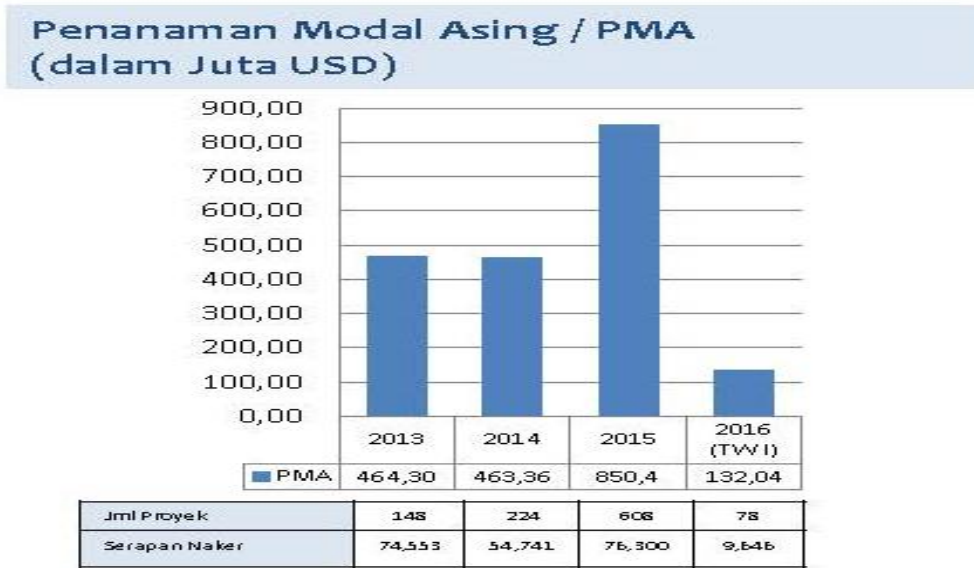
Central Java Investment Board

5

Sumber: http://dpmpstsp.jatengprov.go.id/assets/uploads/Paparan_Peluang_Investasi_di_Jawa_Tengah

⁵ BPMD, *Peluang Investasi di Jawa Tengah*, diakses dari <http://dpmpstsp.jatengprov.go.id/> pada tanggal 16 Maret 2017. Pukul 03.00

Grafik 1.2 Realisasi Investasi Penanaman Modal Asing Tahun (2013-2016)



Sumber: http://dpmpstp.jatengprov.go.id/assets/uploads/Paparan_Peluang_Investasi_di_Jawa_Tengah

Keterangan:

Manifestasi penyerapan Penanaman Modal Asing Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2015. Telah terjadi peningkatan sebesar 83,53% jika dibandingkan pada tahun 2014, yakni dari 463,36 juta USD menjadi 850,40 juta USD atau jika dikoversikan ke dalam mata uang Rupiah sebesar Rp 10,63 Trilyun.

**Grafik 1.3 Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Tahun 2013-2016.
(Gubernur Ganjar Pranowo)**



Sumber: http://dpmpstp.jatengprov.go.id/assets/uploads/Paparan_Peluang_Investasi_di_Jawa_Tengah

Keterangan:

Manifestasi penyerapan Penanaman Modal Dalam Negeri Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2015. Telah terjadi peningkatan sebesar 13,30% jika dibandingkan pada tahun 2014, yakni dari Rp 13,6 Triliun menjadi Rp 15,41 Triliun.

Di awal masa pemerintahan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo fokus pada bidang pengembangan infrastruktur, pengembangan komoditas pangan dan pengembangan pemanfaatan daerah wisata untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat yang tersebar di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Modal menjadi salah satu hal yang sangat penting untuk mensukseskan semua aspek tersebut. Modal menjadi sebuah syarat jika menginginkan pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan apa yang direncanakan. Paul Krugman menyatakan bahwa modal asing memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi angka pertumbuhan perekonomian di wilayah Asia. Dengan masuknya modal asing di wilayah Asia banyak pembangunan infrastruktur terjadi. pembangunan infrastruktur yang bersifat berkelanjutan yang dipengaruhi oleh penanaman modal asing dapat meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat dengan tersedianya banyak lapangan pekerjaan.⁶ Modal dan penanaman modal asing menjadi salah satu solusi bagi negara di wilayah asia yang sebagian besar termasuk ke dalam negara-negara berkembang dalam mencari sumber dana untuk pembangunan dan pertumbuhan ekonomi di negaranya.

Kemampuan pemerintah baik pusat maupun daerah dalam memberikan jaminan kepada investor asing agar menanamkan modalnya secara berkelanjutan di wilayahnya dapat dilihat dari kemampuan pemerintah tersebut dalam mempersiapkan lahan investasi, membuat sejumlah regulasi dan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kegiatan investasi asing dan mendukung kegiatan investasi asing, mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Hal ini bertujuan agar baik pemerintah maupun investor asing saling menguntungkan dan dapat meminimalisir sejumlah kerugian yang terjadi dari kegiatan penanaman modal asing tersebut.

⁶ Paul Krugman, *Majalah SWA*, 05/XIV/5-18 Maret 1998 dalam Sidik Jatmika, *Otonomi Daerah Perspektif Hubungan Internasional*, Bigraf, Yogyakarta, 2001, hal.77

Daerah Provinsi Jawa Tengah ialah daerah yang sangat mendukung kegiatan investasi asing. Pengembangan investasi asing didukung oleh keadaan keamanan di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang relatif aman, pola pikir masyarakat di wilayah Provinsi Jawa Tengah berwawasan luas dalam menyikapi kegiatan investasi asing, adanya kesadaran di pola pikir mereka bahwa dengan mendukung adanya investasi asing sama dengan ikut berpartisipasi aktif dalam mendukung pembangunan di daerah Provinsi Jawa Tengah dan terdapat sejumlah kebijakan atau regulasi yang sangat mendukung kegiatan penanaman modal asing tersebut. Pengembangan investasi di daerah Provinsi Jawa Tengah berfokus pada sektor pertanian, perkebunan, energi dan pembangunan infrastruktur.

Untuk mendukung kegiatan investasi asing di Daerah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah daerah Provinsi Jawa Tengah telah banyak menghasilkan sumber daya manusia yang sangat berkualitas yang telah dipersiapkan untuk menggerakkan roda perekonomian dan pembangunan. Hal ini dapat terlihat dari banyaknya lembaga pendidikan yang tersebar di wilayah Jawa Tengah, seperti 274 Universitas baik negeri maupun swasta, 1189 Sekolah Kejuruan dan memiliki sejumlah Balai Latihan Kerja di setiap Kabupaten yang berada di daerah Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya alam yang tersebar baik di daratan maupun di lautan. Di daratan, banyak tersebar aneka barang tambang (contoh: Pasir besi, Kapur dan Belerang), memiliki kondisi tanah yang sangat subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan, banyak tersebar aneka sumber daya energi (contoh: Panas Bumi, Gas Alam dan Minyak Bumi) dan memiliki daerah pariwisata yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi (contoh: Candi Borobudur, Candi Prambanan, objek wisata Karimunjawa dan objek wisata Dieng).⁷ Di lautan, daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki hasil kekayaan perikanan yang sangat melimpah. Hasil tangkapan ikan sebagian ada yang diekspor, dijual di wilayah Provinsi Jawa Tengah dan dikonsumsi sendiri. Potensi kekayaan darat dan laut yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Tengah menjadi modal yang sangat berharga dalam mendukung peningkatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah.

⁷ Wisata Jateng, *Objek Wisata Unggulan Jawa Tengah*, diakses dari <http://wisatajateng.com/wisata>. Pada tanggal 16 maret 2017. Pukul 09.00

Dengan memiliki sejumlah kekayaan alam yang sangat melimpah, memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan adanya regulasi atau kebijakan yang sangat mendukung investasi asing di Provinsi Jawa Tengah. Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat mengurangi ketergantungannya terhadap Pemerintah Pusat dalam mendapatkan sumber dana untuk Pembangunan dan menjadikan pengembangan dan penanaman modal asing sebagai sumber utama dalam pembangunan di Daerah Provinsi Jawa Tengah. Berkurangnya rasa ketergantungan antara Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah pusat merupakan salah satu cara untuk mensukseskan kebijakan Otonomi Daerah yang mulai diterapkan di Indonesia beberapa tahun terakhir.

Pada masa pemerintahan Ganjar Pranowo, pengembangan dan penanaman modal asing mendapatkan perhatian secara penuh dan menjadi hal yang sangat penting untuk menciptakan sebuah kondisi daya saing perekonomian baik dalam skala daerah, antar daerah dan antar negara. Penanaman modal asing di daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu bersaing dengan baik dan kompetitif agar dapat menggantikan beberapa kualitas komparatif sebagai kualitas kompetitif. Dibutuhkan sebuah rencana penanaman modal yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Seperti pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomer 16 tahun 2012 mengenai Rencana Umum Penanaman modal, pasal tersebut berisi tentang Pemerintah Provinsi membuat Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang berdasarkan pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan lebih mengutamakan pengembangan potensi provinsi. Selanjutnya pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 7 Tahun 2010 mengenai Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, pasal tersebut berisi tentang Pemerintah Daerah memiliki otoritas dalam membuat kebijakan Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) ialah sebuah dokumen perencanaan yang berlaku sampai tahun 2025. Memiliki fungsi untuk menggerakkan dan mengorganisasikan semua elemen yang memiliki keterkaitan dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam menetapkan wilayah, daerah dan sektor-sektor pengembangan penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Agar tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) harus memiliki kelembagaan yang kompeten, baik di daerah Provinsi maupun di wilayah Kabupaten atau kota.

Diperlukannya sebuah cara pandang dan visi yang sama dari semua elemen yang terkait di bidang penanaman modal agar pembagian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak berjalan dengan baik.⁸

Dipilihnya daerah Provinsi Jawa Tengah menjadi wilayah percontohan yang pertama mengenai Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi salah satu keberhasilan Gubernur Ganjar Pranowo di awal tahun pemerintahannya (pada tahun 2014), dan menjadi salah satu cara untuk menarik investor asing agar mau menanamkan modalnya di daerah Provinsi Jawa Tengah. Sistem tersebut terhubung dari daerah Provinsi Jawa Tengah, menjadi proyek uji coba sebelum BKPM melakukannya di Provinsi lainnya. Sistem PTSP di daerah yang berada di wilayah Provinsi Jawa Tengah mampu dihubungkan dengan BKPM. Sejak adanya UU Otonomi Daerah, pemerintah tingkat Provinsi hingga pemerintah Kabupaten mempunyai kewenangan memberikan perizinan. Termasuk kewenangan dalam membuat sistem pelayanan yang bisa meningkatkan investasi dan membuka lapangan kerja baru. PTSP daerah lebih kreatif dan inovatif namun terdapat permasalahan, permasalahannya ialah PTSP daerah lebih fokus pada meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan fokus pada pelayanan kepada investor baik lokal maupun asing.⁹

Kekayaan sumber daya alam dan kualitas sumber daya manusia di Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki pengaruh yang sangat besar dalam peningkatan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dalam beberapa waktu terakhir. Selain itu didukung oleh data BKPM RI yang memberikan hasil analisa dan paparan keunggulan:

1. Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki posisi yang strategis sebagai pusat pelayanan transportasi angkutan laut dan udara di Pulau Jawa, dan sebagai pusat pelayanan jasa hasil pertanian, hasil perkebunan, perdagangan hasil perikanan, sebagai daerah UMKM yang potensial.

⁸ Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 51 Tahun 2012 *Tentang Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2025*.

⁹ BKPM Pusat, *Jawa Tengah Ditunjuk Jadi Daerah Percontohan PTSP Terintegrasi*, diakses dari <http://www.varia.id/2014/12/20/jawa-tengah-ditunjuk-jadi-daerah-percontohan-ptsp-terintegrasi/>. Pada tanggal 16 maret 2017. Pukul 04.00

2. Daerah Provinsi Jawa Tengah merupakan wilayah yang relatif aman bagi para investor asing yang ingin menanamkan dan mengembangkan modal asingnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Yang di mana jarang terjadinya pergesekan dan konflik sosial di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
3. Kekayaan alam yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang menjadi salah satu variabel pendukung peningkatan penanaman dan pengembangan modal asing di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
4. Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketersediaan infrastruktur pendukung peningkatan penanaman dan pengembangan modal asing di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
5. Daerah Provinsi Jawa Tengah yang berada di tengah Pulau Jawa berpotensi menjadi daerah pasar terpadu dalam kegiatan perekonomian
6. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen penuh dalam memberikan segala kemudahan bagi para investor asing dan menghilangkan segala macam bentuk peraturan yang dianggap menghambat proses penanaman dan pengembangan modal asing di Jawa Tengah.
7. Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki sumber daya manusia yang berkualitas.
8. Daerah Provinsi Jawa Tengah memiliki ketersediaan lahan yang masih luas, dan relatif murah.

Berdasarkan hasil analisa dan paparan keunggulan berinvestasi di daerah Provinsi Jawa Tengah oleh BKPM RI.¹⁰ Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Gubernur Ganjar Pranowo berkomitmen penuh menjaga agar selalu terciptanya kondisi dan iklim yang sangat kondusif dalam mendukung penanaman dan pengembangan modal asing di Provinsi Jawa Tengah.

Kondisi dan iklim yang sangat kondusif dalam mendukung penanaman dan pengembangan modal asing di Provinsi Jawa Tengah dapat terlaksana jika koordinasi antara pihak-pihak yang terkait dalam penanaman, pengembangan dan peningkatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah seperti DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu), BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan

¹⁰ Badan Kerjasama dan Penanaman Modal RI, *Potensi Investasi Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013*, diakses dari <http://www.bkpm.go.id/>. Pada tanggal 08 February 2017. Pukul 09.00

Daerah) dan DPRD Provinsi Jawa Tengah terjalin dengan baik, meminimalisir terjadinya konflik kepentingan antar instansi di Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Para pejabat pemangku kepentingan yang berada di dalam instansi Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dapat memberikan bukti kepada para investor asing bahwa para investor asing sangat tepat untuk menginvestasikan modalnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Dengan adanya para investor yang menanamkan dan mengembangkan modalnya di daerah Provinsi Jawa Tengah secara langsung dapat mendukung kebijakan otonomi daerah yang dibuat oleh pemerintah pusat dan terjadinya peningkatan perekonomian yang berdampak pada pembangunan yang merata.¹¹

B. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi terjadinya peningkatan investasi asing di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
2. Menganalisis beberapa wilayah di Jawa Tengah yang berpotensi sebagai wilayah pro-investasi asing.
3. Menganalisis beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung kegiatan investasi asing di wilayah Provinsi Jawa Tengah
4. Menjawab pokok permasalahan dan menguji hipotesa yang diajukan penulis.
5. Menerapkan teori yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan dan menuangkannya ke dalam suatu fenomena masyarakat. Sehingga penulis dapat menganalisis, mendeskripsikan, menjelaskan dan memprediksi fenomena yang ada.
6. Sebagai bahan acuan dan sumber dalam pencarian data terkait peningkatan investasi asing di Jawa Tengah.

C. Kontribusi

Hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat terhadap:

1. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan bagi Pemerintah daerah dan investor asing untuk melaksanakan investasi asing yang akan digunakan untuk meningkatkan perekonomian, peningkatan sejumlah program kerjasama yang

¹¹ BPMD, *Peluang Investasi di Jawa Tengah*, diakses dari <http://dpmptsp.jatengprov.go.id/>. pada tanggal 08 February 2017. Pukul 06.00

harus sesuai dengan *Memorandum of Understanding* (MoU) peningkatan modal belanja untuk pembangunan bagi pemerintahan.

2. Sebagai bahan dan sumber data untuk pengkajian lebih lanjut mengenai Investasi asing sebagai salah satu cara diplomasi yang memiliki potensi dan tantangan bagi pemerintah daerah untuk menjalin berbagai macam kerjasama internasional.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, rumusan masalah yang akan digunakan di dalam Thesis ini ialah mengapa pemerintah Jawa Tengah berhasil meningkatkan investasi asing di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2013-2016??

E. Studi Pustaka

Di era globalisasi pada saat ini, kerjasama tidak harus menitikberatkan pada kerjasama dalam negeri akan tetapi kerjasama luar negeri dapat dilakukan sebagai sebuah solusi dalam memecahkan sebuah permasalahan yang telah terjadi. kerjasama luar negeri antar negara tidak memiliki batasan-batasan yang bersifat normatif dan struktural. Kerjasama antar negara secara tidak langsung telah menghilangkan secara nyata batas-batas kedaulatan antar negara. Perubahan paradigma kerjasama antar negara pada saat ini tidak terbatas antar negara. Kerjasama dapat dilakukan antar negara, negara dengan pemerintah daerah di suatu negara, pemerintah daerah antar negara, dan individu dengan pemerintah daerah di suatu negara.

Terciptanya kerjasama yang dilakukan berdasarkan kepada sejumlah permasalahan yang ingin diatasi dan mencari jalan keluarnya. Di Indonesia, Pemerintah Daerah selalu memperoleh kesulitan dalam mensejahterakan rakyat di daerahnya dan kesulitan mendapatkan permodalan untuk belanja rutin daerah. Sebelum diterapkannya kebijakan Otonomi Daerah oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah selalu mengalami ketergantungan kepada pemerintah pusat dalam mencari sumber dana untuk peningkatan kesejahteraan dan pembangunan. Setelah diterapkannya Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mencari sumber dana sendiri dalam pemerataan

pembangunan, modal belanja, peningkatan kemakmuran rakyat di daerah dan tidak mengalami ketergantungan modal kepada pemerintah pusat.

Di era otonomi daerah, Pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri, kreatif, bebas mencari sumber modal dan aktif mencari berbagai peluang yang bisa dijadikan sumber pemasukan kas daerah. Banyak berbagai macam produk regulasi dan kebijakan pemerintah daerah yang dibuat dan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). Pemerintah Daerah memiliki peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi di daerahnya, yaitu sebagai Fasilitator, Koordinator, Entrepreneur dan Stimulator.

Sebagai literature review, penulis menggunakan sejumlah buku, jurnal maupun karya ilmiah sebagai pelengkap data. Di dalam buku *Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia* (2013), karangan bapak Takdir Ali Mukti menyatakan bahwa hubungan transnasional yang mempengaruhi sistem interaksi masyarakat internasional pasca Westphalia mempunyai karakter yang lebih partisipatif bagi semua aktor hubungan internasional, baik tingkat negara atau lokal, institusional atau individual.

Hubungan transnasional secara tidak langsung menghapuskan batas kedaulatan antar negara, akan tetapi justru menghasilkan sebuah aturan lebih lanjut tentang komitmen negara untuk memberikan kedaulatannya berdasarkan kepentingan dan tujuan tertentu.¹² Kepentingan dan tujuan tertentu dalam ranah global diharapkan mampu dirasakan manfaatnya bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di negara tersebut. Christy Damayanti menyatakan bahwa paradiplomasi ialah sebagai bentuk usaha pemerintah daerah dalam bidang hubungan luar negeri yang harus dilakukan berdasarkan pendekatan paham diplomasi multi jalur (*multitrack diplomacy*) sebagai acuan dan fokus utama dalam hubungan internasional yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan globalisasi dan demokrasi yang sedang berjalan.¹³

Dalam kerangka paradiplomasi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 11 Maret 2010 di depan para pengusaha Australia di Canberra, Australia,

¹² Takdir Ali Mukti, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013.

¹³ Christy Damayanti, "Potensi Paradiplomasi Dalam Mendukung Kinerja Diplomasi Indonesia Menuju Komunitas ASEAN", *Transformasi*, Vol.XIV, No 22, 2012.

menyatakan bahwa para pengusaha Australia diberikan kesempatan untuk menghubungi, menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah (kabupaten/kota dan provinsi) di Indonesia, terutama para Gubernur untuk mengadakan kegiatan penanaman modal (investasi asing) di Indonesia. Jika dalam hal penanaman modal asing di Indonesia menemukan hambatan dan kesulitan segera menghubungi menteri terkait. Jaringan kerjasama yang dilakukan oleh pihak asing dengan Pemda dilakukan karena disadari sepenuhnya bahwa tanpa kerjasama dengan investor asing atau pihak asing lainnya seperti pemerintah asing dan organisasi asing pertumbuhan ekonomi di daerah akan sulit didorong untuk berkembang lebih cepat.¹⁴

Pernyataan Presiden tersebut berdasarkan pada Undang-Undang yang memberikan peluang bagi daerah untuk melakukan kerjasama dengan pihak asing. di dalam Undang-Undang nomer 32 Tahun 2004, kewenangan daerah otonom untuk melakukan kerjasama dengan luar negeri terdapat dalam pasal 42 ayat (1) bahwa DPRD memiliki tugas dan wewenang untuk memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah, membuat perjanjian kerjasama dalam bidang bantuan kemanusiaan, kerjasama bantuan hibah/pinjaman dan kerjasama penyertaan modal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ada kenyataan bahwa para birokrat di Pemda Provinsi, Kabupaten dan Kota yang sebelumnya nyaris tidak pernah berhubungan langsung dengan dunia internasional akan mengalami kesulitan dan tidak memiliki pengalaman jika dihadapkan dengan kerjasama dengan pihak asing. Dalam pelaksanaannya, birokrat diharapkan memiliki kemampuan dalam menjalin relasi, mengadakan negosiasi dan memahami hukum di kedua belah pihak negara yang berbeda. Jika birokrat tidak memiliki kemampuan tersebut akan berdampak langsung pada kualitas produk kerjasama yang dibuat oleh berbagai pihak asing tersebut belum optimal dalam mendorong laju pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. justru sebaliknya, akan memboroskan keuangan daerah (APBD) karena para birokratnya sering melakukan kunjungan ke luar negeri. pengawasan DPRD terhadap pelaksanaan kerjasama internasional di daerah menjadi sangat penting sebab dengan munculnya kewenangan baru bagi daerah otonom akan secara otomatis berdampak pada penganggaran daerah. Pengawasan ini bukan hanya bertujuan untuk mencegah timbulnya pemborosan

¹⁴ Takdir Ali Mukti Op.Cit. Hal 2

anggaran daerah, namun memiliki tujuan juga untuk pihak asing selalu mentaati kesepakatan yang telah dibuat.¹⁵

Jurnal karya Harrod Domar yang berjudul *Hubungan Perencanaan Pembangunan Dengan Investasi* (2000) menyatakan bahwa pertumbuhan perekonomian di daerah dengan tingkat investasi di daerah memiliki keterkaitan langsung. Dijelaskan bahwa investasi asing di suatu daerah kurang, akan berdampak pada rendahnya pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut. Dan sebaliknya, jika investasi asing di suatu daerah tinggi akan berdampak pada tingginya pendapatan perkapita masyarakat di daerah tersebut.¹⁶ Hal tersebut linear dengan keadaan investasi asing di Jawa Tengah dengan pendapatan penduduk perkapita yang berbeda-beda antar kabupaten kota. Sebagai contoh, Kabupaten Cilacap dari tahun 2012 hingga tahun 2015 sebagai Kabupaten tujuan utama penanaman modal asing. banyak investor asing yang berasal dari negara Tiongkok dan Arab Saudi menanamkan modal di Kabupaten Cilacap. Investor asing dari Tiongkok fokus pada investasi di bidang pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang berlokasi di daerah Karangandri Kabupaten Cilacap, dan Investor asing dari Arab Saudi fokus pada investasi di bidang pengolahan minyak bumi melalui perusahaan Saudi Aramco yang berlokasi di daerah Donan Kabupaten Cilacap. Pendapatan perkapita Kabupaten Cilacap dari tahun 2012-2015 atas dasar harga konstan. Tahun 2012 sebesar Rp. 6.090.696,00. Tahun 2013 sebesar Rp. 6.408.325,00. Tahun 2014 sebesar Rp. 6.715.102,00. Tahun 2015 sebesar Rp. 6.861.342,00. Pendapatan perkapita Kabupaten Cilacap dari Tahun 2012-2015 atas dasar harga berlaku. Tahun 2012 sebesar Rp. 13.744.886,00. Tahun 2013 sebesar Rp. 15.381.061. Tahun 2014 sebesar Rp. 16.754.007. Tahun 2015 sebesar Rp. 16.881.052.¹⁷

Di dalam buku yang berjudul *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*. Karya Pheni Chalid mengenai investasi, menemukan beberapa macam variabel pendukung terjadinya peningkatan investasi asing di daerah. Pheni Chalid menyatakan bahwa otonomi daerah pada saat ini sebagai salah satu

¹⁵ Ibid., Hal 7

¹⁶ Jhingan, *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), Hal 88

¹⁷ Pemerintah Kabupaten Cilacap, *Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Cilacap Tahun 2015*, diakses dari <http://www.cilacapkab.go.id/v2/files/LK16.7>. Pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 19.30.

indikator terjadinya peningkatan aktifitas perdagangan dan investasi di daerah. Peningkatan aktifitas perdagangan dan investasi di daerah dapat berpengaruh pada tingkat pertumbuhan ekonomi di daerah. Memiliki pengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi dikarenakan oleh tersedianya jumlah lapangan pekerjaan yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan jumlah kepadatan penduduk, terjadinya peningkatan pendapatan penerimaan daerah dalam bentuk pajak dan retribusi. Jika dilihat dari pernyataannya, kondisi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap sangat dipengaruhi oleh aktifitas investasi asing. pertumbuhan ekonomi Kabupaten Cilacap dibagi menjadi dua, Pertumbuhan ekonomi dengan minyak dan tanpa minyak. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 dengan minyak sebesar 3,03 %, pada tahun 2013 dengan minyak sebesar 2,41%, pada tahun 2014 dengan minyak sebesar 3,27%, pada tahun 2015 dengan minyak sebesar 4,12 %. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 tanpa minyak sebesar 5,47%, pada tahun 2013 tanpa minyak sebesar 5,50%, pada tahun 2014 tanpa minyak sebesar 5,09%, dan pada tahun 2015 tanpa minyak sebesar 5,61%.¹⁸

Indikator pertumbuhan ekonomi di daerah dapat terlihat dari output yang dihasilkan dan bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang tersedia di daerah sehingga arus mobilisasi barang dan jasa antar daerah lebih optimal dan lancar.¹⁹ Setelah ditetapkannya kebijakan otonomi daerah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, investasi asing menjadi sebuah cara yang tepat dan efektif dalam upaya meningkatkan kondisi perekonomian di daerah, sebagai modal pembangunan daerah dan setiap daerah menggunakan segala cara yang telah ditetapkan oleh undang-undang yang berlaku di Indonesia untuk bersaing dengan daerah lain dalam hal mendatangkan investor asing di daerahnya.

Penelitian dilakukan oleh Nisa Shifa Rahimah dan Heru Purboyo Hidayat Putro di dalam jurnalnya yang berjudul *Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Sebaran*

¹⁸ Bappenas, *Indikator Pembangunan Kabupaten Cilacap 2015*, diakses dari [http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/164246-\[_Konten_\]Konten%20D1438.pdf](http://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/164246-[_Konten_]Konten%20D1438.pdf). Pada tanggal 19 Mei 2017 Pukul 19.35

¹⁹ Pheni Chalid, *Keuangan Daerah Investasi, Dan Desentralisasi: Tantangan dan Hambatan*, Kemitraan Partnership, Jakarta, 2005, hal 108-109

Investasi di Provinsi Jawa Barat yang dilakukan pada tahun 2007 hingga 2011.²⁰ Melakukan penelitian tentang apakah terdapat hubungan langsung dan apakah memiliki pengaruh antara persebaran investasi asing dengan kondisi infrastruktur di Provinsi Jawa Barat dari tahun 2007-2011. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa telah terjadi peningkatan pembangunan infrastruktur dari tahun 2007-2011. Peningkatan pembangunan infrastruktur tersebut dipengaruhi oleh adanya investasi asing yang terjadi di suatu daerah. Kedua variabel tersebut saling mendukung dan memiliki hubungan satu sama lain. Investasi asing dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan jika kondisi infrastruktur baik dan jika kondisi infrastruktur yang digunakan untuk mendukung kegiatan investasi asing belum dibangun dan tidak sesuai apa yang diharapkan dapat dipastikan investasi asing yang sedang berlangsung akan mengalami ketidaklancaran mobilitas. Tingkat keberhasilan investasi asing terjadi di wilayah perkotaan yang memiliki kondisi infrastruktur yang terpelihara dengan sangat baik.

Kemudian penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Ikhsan Setiawan, Agus dan Satirianingrum di dalam jurnalnya yang berjudul *Linier Trend Analysis Dampak Peningkatan Investasi Di Daerah Terhadap Pengembangan Property Komersial*.²¹ Penelitian dilakukan di kota besar di Indonesia seperti Kota Makassar, Banten dan Bandung. Di dalam penelitian tersebut menjelaskan bahwa tingginya peningkatan investasi asing disebabkan oleh kondisi infrastruktur, lokasi yang sangat strategis, regulasi yang mendukung adanya investasi asing di daerah. Ketiga variabel yang sudah disebutkan diatas menjadi faktor yang sangat penting dalam menarik investor asing untuk menanamkan modal di daerah.

Di dalam buku *Isu, Problematika, Dinamika Perekonomian dan Kebijakan* yang dikarang oleh H. Muhammad Zaenuddin, menjelaskan sebab mengapa kota Batam sebagai tujuan utama investor asing dalam menanamkan dan mengembangkan modalnya di kota tersebut. Investasi asing pertama kali masuk di kota Batam pada tahun

²⁰ Heru Purboyo, "Pengaruh Infrastruktur Jalan Terhadap Sebaran Investasi di Provinsi Jawa Barat", Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota 2 SAPPK V3N3| 663, tahun 2013

²¹ M. Ikhsan Setiawan, "Linier Trend Analysis Dampak Peningkatan Investasi Di Daerah Terhadap Pengembangan Property Komersial", Jurnal Spirit Pro Patria Volume 1 Nomor 2 31 Desember 2015

1992 hingga tahun 2006. Para investor asing menilai bahwa kota Batam ialah kota yang sangat indah, kota yang tertata rapi, kota yang letaknya sangat strategis, kota yang letaknya berbatasan langsung dengan negara Singapura dan terdapat regulasi berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2007 yang menetapkan bahwa kota Batam sebagai wilayah kawasan pelabuhan dan perdagangan bebas. Sehingga dapat disimpulkan secara garis besar bahwa terjadinya peningkatan investasi asing di kota Batam dipengaruhi oleh posisi kota yang sangat strategis, kondisi kota, dan terdapat regulasi PP Nomor 46 Tahun 2007.²²

Penelitian juga dilakukan oleh D.Fischer dan M.Stater yang menjelaskan mengenai investasi asing di Tiongkok. Di dalam penelitiannya menjelaskan bahwa alasan yang mendasar mengapa Negara Tiongkok justru membuka diri dengan dunia luar dan memberikan kesempatan yang sangat besar bagi para investor asing untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di negara Tiongkok karena negara Tiongkok ingin mendapatkan dana-dana asing yang digunakan untuk modal pembangunannya, ingin mendapatkan ilmu dan keahlian managerial yang berasal dari investor asing, dan ingin merubah negara Tiongkok menjadi negara yang modern yang modal pembangunannya berasal dari para investor asing. dari ketiga alasan tersebut diatas hingga pada saat ini keuntungan yang berasal dari peningkatan investasi asing yang terjadi di negara Tiongkok justru digunakan lagi oleh negara Tiongkok untuk menginvestasikan modalnya kepada negara lain.²³

Berdasarkan dari hasil beberapa pendapat para ahli, penulis dapat menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara otonomi daerah, investasi asing dan globalisasi. Otonomi daerah mengharuskan setiap Pemerintah Daerah untuk lebih mandiri dan kreatif dalam mencari sumber modal pembangunan dan meningkatkan perekonomian di daerah tanpa adanya sikap ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat. Untuk meminimalisir rasa ketergantungan terhadap Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah menjadikan Penanaman modal asing (Investasi Asing) sebagai cara yang paling efektif dalam mencari sumber dana dan modal untuk menggerakkan roda pembangunan,

²² Muhammad Zaenuddin, *Isu, Problematika, dan Dinamika Perekonomian, dan Kebijakan*, (Yogyakarta: Deepublish publisher, 2015).

²³ D.Fischer dan M.Stater, *Direct Investment In The PRC*, dalam A.J de Rood an R.W.Jagtenberg, *Yearbook Law & Legal Practice In East Asia*. Volume I, 1995, Hal. 53 dalam Sentosa Sembiring, *Hukum Investasi*, Nuansa Aulia, Bandung, 2010, hal. 193.

pemerintah daerah bisa belajar dalam menjalin hubungan kerjasama dengan pihak-pihak asing yang menguntungkan, setiap pemerintah daerah dapat bersaing secara sehat dalam membuka kerjasama internasional (di bidang investasi) dengan bertindak atas nama mereka sendiri tanpa membawa nama pemerintah pusat.

Secara otomatis Negara sama sekali tidak kehilangan kedaulatannya sebagai sebuah identitas atau entitas yang sebelumnya memiliki peranan yang sangat penting dalam hubungan internasional. Paradiplomasi menjadi sesuatu hal yang sangat penting dalam peningkatan kerjasama antar negara. Peningkatan kerjasama dilakukan karena setiap aktor dalam hubungan internasional memiliki kepentingan yang sama yaitu mendapatkan keuntungan. Peningkatan kerjasama antar negara dan transnasional sebagai akibat dari lahirnya sebuah fenomena yang bernama Globalisasi.

F. Kerangka Teori

1. Konsep Paradiplomasi

Fenomena Globalisasi yang melanda di seluruh dunia menjadikan batas kedaulatan antar negara semakin kabur karena dalam sebuah proses kerjasama untuk mendapatkan keuntungan yang ingin diperoleh harus menghilangkan segala bentuk yang dianggap menghambat proses kerjasama tersebut. Globalisasi dalam prakteknya tidak lepas dari perkembangan teknologi dan informasi yang ruang lingkupnya tidak mengenal batasan ruang dan waktu sehingga dapat melahirkan berbagai macam bentuk diplomasi yang modern. Bentuk diplomasi modern tersebut menggantikan bentuk diplomasi konvensional yang terkesan sangat kaku. Bentuk diplomasi kuno hanya dilakukan oleh individu terpilih, mendapatkan pendidikan khusus dari pemerintah sebuah negara dan mengemban misi khusus yang berasal dari negara yang bersangkutan yang secara umum kita kenal dengan istilah *Diplomat*. Bentuk diplomasi modern sangat fleksibel tidak terbatas ruang lingkupnya hanya *Diplomat* saja, akan tetapi melahirkan berbagai macam aktor yang memiliki peranan dalam hubungan internasional

Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan terluas yang terletak diantara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik, terletak diantara Benua Asia dan Benua Australia. Sebagai negara kepulauan terluas, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam usaha pemerataan dan peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan rakyatnya menggunakan kebijakan desentralisasi berupa Otonomi Daerah. Dengan

adanya otonomi daerah pemerintah pusat memberikan kewenangan bagi pemerintah daerah untuk mengelola sumber keuangan secara mandiri, mencari sumber dana untuk modal pembangunan di daerahnya secara kreatif dan untuk mengurangi rasa ketergantungan dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat dalam hal pemasukan bagi pemerintah daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah diharapkan dapat mampu memberikan dampak yang lebih terhadap kesejahteraan masyarakat di daerah, terjadinya efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, banyak anggaran yang terpakai sesuai dengan apa yang sudah direncanakan dan disetujui bersama. dilaksanakannya otonomi daerah mengharuskan pemerintah daerah untuk mencari sumber modal dan dana untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya. Pencarian sumber dana dan modal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah bisa berasal dari sumber dalam negeri dan luar negeri. Sumber dalam negeri dengan mengandalkan potensi sumber daya alam yang tersebar di daerahnya, mengandalkan potensi pariwisata, dan mengandalkan kualitas sumber daya manusia. Sumber dana dan modal yang berasal dari luar negeri dengan mengandalkan penanaman modal asing (investasi asing), mendatangkan para investor asing untuk menanamkan dan mengembangkan investasi di daerah, dan mempromosikan daerah-daerah yang memiliki potensi investasi kepada para investor.

Dalam usahanya mencari sumber dana dan modal yang berasal dari luar negeri secara tidak langsung melahirkan aktor baru dalam hubungan internasional yaitu Pemerintah Daerah. Dalam pencarian sumber dana dan modal tidak terbatas pada hubungan pemerintah daerah dengan individu (investor asing), akan tetapi cakupannya lebih luas. Bisa hubungannya pemerintah daerah dengan suatu negara, pemerintah daerah dengan perusahaan disebuah negara dan antar pemerintah daerah dengan pemerintah daerah disuatu negara. Dalam hubungan internasional, hubungan ini disebut sebagai Transnasional.²⁴ Dan bentuk diplomasinya ialah diplomasi publik.

Paradiplomasi menjadi sesuatu yang baru dalam pembahasan ilmu hubungan internasional. Paradiplomasi diperkenalkan oleh ilmuan asal Basque pada tahun 1980 yang bernama Panayotis Soldatos. *Paradiplomacy* merupakan bentuk akronim dari

²⁴ Sidik Jatmika, Otonomi Daerah Dalam Perspektif Hubungan Internasional. Yogyakarta: Bigraf Publishing. 2001. Hal 54.

istilah *Parallel Diplomacy* menjadi *Paradiplomacy*. Ivo Duchacek memberikan istilah lain yang dipakai untuk menjelaskan *Paradiplomacy* ialah *Microdiplomacy*.²⁵ Konsep *Paradiplomacy* yang sudah ditemukan oleh Pavanotis Soldatos dan dijabarkan oleh Ivo Duchacek membagi konsep tersebut menjadi tiga buah untuk dapat mudah dipahami.

Yang pertama *Transborder Paradiplomacy*, *Transborder Paradiplomacy* ialah hubungan yang terjalin antar kedua negara baik secara formal atau non formal yang dilakukan oleh pemerintah pusat atau sub pemerintahan, hubungan yang terjalin berdasarkan pada hubungan emosional, sejarah dan budaya, dan secara geografis kedua negara memiliki wilayah perbatasan dan kedaulatan langsung. Yang kedua *Transregional Paradiplomacy*, *Transregional Paradiplomacy* ialah hubungan yang terjalin antar kedua negara baik secara formal atau non formal yang dilakukan oleh pemerintah sub nasional yang berbeda negara, tidak berbatasan secara langsung dengan negara tersebut dan berada di dalam satu kawasan. Yang ketiga ialah *Global Paradiplomacy*, *Global Paradiplomacy* ialah hubungan yang terjalin antar negara baik secara formal atau non formal, tidak berbatasan secara langsung, berada di kawasan dan wilayah yang berbeda, dan secara global.

Paradiplomacy dilakukan oleh aktor yang memiliki kemampuan dan perilaku untuk melakukan hubungan dengan pihak asing yang dilakukan oleh entitas *sub state* (pemerintah daerah) dengan tujuan untuk meraih kepentingan mereka secara khusus.²⁶ Fenomena *Paradiplomacy* dapat meningkatkan peran yang bukan berasal dari sebuah negara seperti contoh pemerintah daerah dan individu yang memiliki kepentingan. Bagi pemerintah daerah *Paradiplomacy* menjadi salah satu cara untuk menarik para investor untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di daerah, memperkenalkan segala macam potensi daerah kepada para investor dan melakukan kegiatan perekonomian yang sifatnya saling menguntungkan (investasi dan perdagangan) dan melakukan kerjasama yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, yang berada di luar wilayah kedaulatan suatu negara. Dengan adanya *Paradiplomacy* Pemerintah daerah lebih aktif dalam hubungan secara internasional.

²⁵ David Crikemans, 'Are The Boundaries between Paradiplomacy and Diplomacy Watering Down?', University of Anwerp and Flemish Centre for International Policy, Belgium, 2008, hal. 34. Dalam Takdir Ali, *Paradiplomacy: Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemda Di Indonesia*, Yogyakarta, 2013. Hal.38.

²⁶ Stefan Wolff, 'Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges', University of Nottingham, 2009, hal. 1-2, dan 13.

Pemerintah daerah di sini ialah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melakukan kegiatan hubungan dengan aktor di luar negara Indonesia. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menarik investor ke wilayah Provinsi Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memberikan kesempatan kepada para investor untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di daerah Provinsi Jawa Tengah. Sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendatangkan investor asing untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah ialah mempersiapkan infrastruktur pendukung penanaman modal asing, menghapus segala bentuk regulasi yang dinilai menghambat kegiatan penanaman modal asing, memperbaiki peraturan yang dinilai tidak mendukung kebijakan penanaman modal asing, mempersiapkan kualitas sumber daya manusia khususnya di bidang instansi pemerintahan dan birokrasi agar pelayanan terhadap investor asing menjadi lebih baik, dan memetakan wilayah kabupaten yang dinilai layak menjadi daerah pro investasi asing.

2. Konsep Investasi Asing

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2007 Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri. Sedangkan modal asing merupakan modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

Terdapat dua faktor penting yang mempengaruhi investasi asing, yaitu variabel lingkungan dan variabel internalisasi.²⁷ Variabel lingkungan sering dikenal dengan istilah keunggulan spesifik atau faktor spesifikasi lokasi. Ada tiga unsur yang membangun variabel lingkungan yaitu, ekonomi, non-ekonomi, dan pemerintah. Variabel ekonomi membangun fungsi produksi suatu bangsa secara kolektif yang meliputi semua input faktor yang ada di masyarakat, antara lain tenaga kerja, modal (dana), teknologi, tersedianya sumber daya alam dan keterampilan manajemen (*human capital*). Terdapat variabel non-ekonomi yang memotivasi masuknya modal asing

²⁷ Alan M. Rugman, *International Bussiness: From and Environtment*, (New York: Mc graw Hill Book, 1985). Hal 73-92

adalah keseluruhan kondisi politik, budaya dan sosial pada suatu negara. Ada beberapa pengamat yang juga memasukan faktor pemerintahan yang bersih dan berwibawa pada suatu negara, baik tuan rumah maupun pemerintah dari negara asal penanam modal tersebut.

Penanaman modal asing di wilayah Jawa Tengah pada masa pemerintahan Ganjar Pranowo memiliki banyak strategi untuk mendatangkan para investor. Strategi tersebut lebih menekankan mekanisme dan beberapa persyaratan penanaman modal asing di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Penanaman modal asing di daerah Provinsi Jawa Tengah diharapkan mampu bersaing dengan baik dan kompetitif agar dapat menggantikan beberapa kualitas komparatif sebagai kualitas kompetitif. Dibutuhkan sebuah rencana penanaman modal yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia pada saat ini. Seperti pasal 4 ayat 1 Peraturan Presiden Nomer 16 tahun 2012 mengenai Rencana Umum Penanaman modal, pasal tersebut berisi tentang Pemerintah Provinsi membuat Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yang berdasarkan pada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) dan lebih mengutamakan pengembangan potensi provinsi. Selanjutnya pasal 5 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomer 7 Tahun 2010 mengenai Penanaman Modal di Provinsi Jawa Tengah, pasal tersebut berisi tentang Pemerintah Daerah memiliki otoritas dalam membuat kebijakan Penanaman Modal dalam bentuk Rencana Umum Penanaman Modal Daerah. Dalam menjalankan kebijakan investasi asing di daerah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur Ganjar Pranowo menjalankan sesuai dengan Peraturan yang berlaku di Indonesia.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) ialah sebuah dokumen perencanaan yang berlaku sampai tahun 2025. Memiliki fungsi untuk menggerakkan dan mengorganisasikan semua elemen yang memiliki keterkaitan dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi sehingga tidak terjadi konflik kepentingan dalam menetapkan wilayah, daerah dan sektor-sektor pengembangan penanaman modal di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Agar tercapainya keberhasilan dalam pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) harus memiliki kelembagaan yang kompeten, baik di daerah Provinsi maupun di wilayah Kabupaten atau kota. Diperlukannya sebuah cara pandang dan visi yang sama dari semua elemen yang terkait

di bidang penanaman modal agar pembagian kewenangan dan koordinasi dari masing-masing pihak berjalan dengan baik.

Cara Gubernur Provinsi Jawa Tengah Ganjar Pranowo dalam meningkatkan penanaman modal asing di wilayahnya²⁸ adalah Memberikan suasana yang kondusif bagi para investor, Pembangunan infrastruktur penunjang penanaman modal asing berjalan dengan baik, Adanya regulasi dalam mendukung investasi, Mensinergikan antara usaha kecil, menengah dan besar agar seimbang, Memanfaatkan potensi sumber daya lokal, Lahirnya kewirausahaan masyarakat. Arah kebijakan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah selama Pemerintahan Ganjar Pranowo: iklim investasi yang meningkat, wilayah penyebaran investasi, mengutamakan investasi di bidang pangan, infrastruktur dan energi, investasi yang berdasarkan aspek lingkungan, pemanfaatan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK), Fasilitas pelayanan dalam investasi, dan memperkenalkan mengenai kerjasama investasi. Beberapa mekanisme pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi yaitu mekanisme pengembangan Penanaman Modal mudah dan memiliki hasil yang nyata, mekanisme mengembangkan pelaksanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan energi, mekanisme mengembangkan pelaksanaan pembangunan industri skala besar, dan mekanisme mengembangkan pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan. Dalam menyusun arah kebijakan dan cara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk meningkatkan investasi asing sebagai gubernur, Ganjar Pranowo menyertakan para Akademisi, Staff Ahli di bidang ekonomi dan LSM untuk memberikan saran dan masukan untuk memajukan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah.

Pelayanan perizinan berinvestasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah yaitu kantor pelayanan BKPM dan PTSP pusat, kantor pelayanan Provinsi Jawa Tengah, kantor pelayanan di 35 Kabupaten kota, satuan tugas khusus mengenai investasi. Pelayanan investasi di wilayah Provinsi Jawa Tengah sangat cepat dan tidak berbelit-belit. Persyaratan pelayanan penanaman modal asing di Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut: memiliki izin prinsip, disahkannya secara hukum perusahaan atau instansi penanaman modal asing, investor harus memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP),

²⁸ Ibid

memiliki tanda daftar perusahaan, rencana penggunaan tenaga kerja asing, memiliki izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing, memiliki angka pengenalan produsen, harus memiliki nomor identitas kepebeanaan, tanda pemesan lahan.

Kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bagi para investor asing yang ingin menanamkan dan mengembangkan modalnya di wilayah Jawa Tengah ialah nilai transaksi investasi minimal sebesar 100 Milyar rupiah, menggunakan tenaga kerja lokal sebanyak 1000 orang, proyek perusahaan terletak di wilayah kawasan industri atau kawasan berikat tertentu. Bagi para investor asing, wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagai tempat yang sangat cocok untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya karena Wilayah Provinsi Jawa Tengah dinilai bagi para investor memiliki tingkat stabilitas keamanan yang cukup baik, memiliki ketersediaan lahan yang masih sangat banyak, banyak sejumlah regulasi dan kebijakan yang sangat pro investasi asing. memiliki upah buruh yang masih rendah. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas wilayah Jawa Tengah tepat dikatakan sebagai wilayah yang pro investasi.

3. Teori Konstruktifisme

Konstruktivisme ialah salah satu cara pendekatan mengenai sudut pandang yang digunakan sebagai alat analisa, berasal dari rasa ketidakpuasan para ilmuwan Hubungan Internasional dalam menerima hasil pemikiran, interpretasi dan pendekatan teori dalam studi Ilmu Hubungan Internasional yang sudah ada sebelumnya.²⁹ Hasil pemikiran dan interpretasi yang sudah ada sebelumnya seperti liberalisme, realisme, strukturalisme dinilai oleh kalangan konstruktivisme terlalu menggunakan variabel power sebagai alat dasar analisis dalam penyelesaian sebuah permasalahan. Power tidak sama sekali mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan perdamaian dunia akan tetapi justru lebih menjadikan para aktor dalam hubungan internasional semakin agresif untuk berbuat konflik.³⁰

Dalam situasi dan kondisi tersebut, para analis dan ilmuwan Hubungan Internasional membagi tiga asumsi yang mendasar dari sudut pandang interpretasi

²⁹ Sugiarto Pramono dan Andi Purwono, *Konstruktivisme Dalam Hubungan Internasional: Gagasan Dan Posisi Teoritik*, (Universitas Wahid Hasyim, 2010), 14.

³⁰ Ibid

Konstruktivisme. Sudut pandang yang pertama ialah setiap tindakan dan perilaku agen berdasarkan kepada ide, identitas dan hasil hubungannya dengan lingkungan sosial. Ide dapat dipahami sebagai hal yang mendasar bagi agen bagaimana cara agen tersebut memaknai dan memandang agen lain. Sebuah ide dari seseorang agen merefleksikan ciri atau identitas dan menjadi sebuah variabel pembeda dengan agen yang lain. Konstruktivisme menganggap bahwa tindakan yang dilakukan oleh agen (presiden, negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah) akan memberikan pengaruh yang sangat nyata di dalam sistem internasional. Dan juga sebaliknya, sebuah sistem internasional juga akan mempengaruhi perilaku agen (presiden, negara, pemerintah pusat dan pemerintah daerah).

Sudut pandang yang kedua ialah memandang sistem internasional sebagai sistem yang anarki. Dalam sistem yang anarki ditemukan hubungan antar agen. Hubungan antar agen ialah sebuah proses untuk saling mempengaruhi satu sama lain antar agen hingga sampai membentuk sebuah sistem internasional. Hal tersebut sangat bertentangan dengan paham realisme yang menjelaskan bahwa pada kenyataannya hubungan internasional bersifat anarki, anarki yang bersifat given. Sudut pandang yang ketiga ialah memberikan fokus utama kajian mengenai permasalahan yang berkaitan dengan bagaimana cara membentuk identitas dan ide.³¹

Teori konstruktivisme dalam struktur sosial dijelaskan oleh Alexander Wendt (1992) terdiri dari tiga elemen dasar, yakni praktik, ilmu pengetahuan bersama dan sumber daya material. Ilmu pengetahuan bersama ialah aspek yang sangat penting dalam memberikan pengaruh terhadap aktor yang saling berhubungan, menjadi variabel dasar dalam mengatur aktor atau agen yang berhubungan, bersifat intersubjektif dan dinamis. Konstruktivisme dibangun di atas asumsi-asumsi idealis yang menempatkan norma, ide, nilai dan budaya sebagai sesuatu yang utama membentuk identitas, kepentingan dan perilaku aktor (negara). Hal ini sesuai dengan Jennifer Sterling dalam

³¹ Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations*, (New York: Oxford University Press Inc, 1999), 164 – 167.

tulisannya “*constructivism shows that even our most enduring institutions are based on collective understandings*”.³²

Dalam sudut pandang konstruktivisme, perilaku agen atau aktor bersifat intersubjektif yang dilatarbelakangi oleh norma, nilai, ideologi, bahasa, budaya dan agama yang berbeda-beda. Perbedaan itulah yang melahirkan fenomena sosial yang membentuk personalitas antar agen dan memandu tindakan antar agen. Intersubjektif tidaklah bersifat statis, karena berubah dari waktu ke waktu berdasarkan perubahan konteks.³³ Interaksi antar agen akan membentuk sebuah struktur baru seperti contoh kerjasama internasional dan praktek diplomasi. Struktur dalam hubungan internasional dinilai sebagai sebuah cara bagi agen untuk menyampaikan ide, gagasan dan hasil pemikiran untuk menciptakan sebuah norma yang disepakati bersama dan berlaku dalam struktur tersebut.³⁴ Konstruktivisme yang dikatakan Wendt, lebih menegaskan pada apakah interaksi antar agen atau antar aktor tersebut bersifat saling bekerja sama atau justru sebaliknya berkonflik.³⁵ Dan kepentingan ialah sebuah hasil musyawarah dari berbagai macam ide, gagasan dan hasil pemikiran yang membentuk identitas sebuah agen atau negara.³⁶ Dalam sudut pandang konstruktivisme memahami sebuah praktek sebagai bentuk kebijakan negara, tindakan agen dan perilaku aktor yang berasal dari kepentingan. Teori konstruktivisme dinilai sebagai teori yang dinamis dan memiliki asumsi bahwa sumber dari teori ini ialah pemikiran dan ilmu pengetahuan yang dimiliki manusia untuk merubah fenomena dan gejala sosial ke dalam ilmu pengetahuan sosial.

Inti dari teori konstruktivisme ialah dunia sosial yang berasal dari hasil konstruksi pemikiran manusia. Wendt menyatakan bahwa: “*The way international politics is conducted is made, not given, because identities and interests are constructed*

³² Jennifer Sterling Folker, *Making Sense Of International Relations Theory*, (London: Lynne Publisher), hlm 118.

³³ Rebecca Adler-Nissen, *Strategies for Research in Constructivist International Relations (International Relations in a Constructed World)*, New York: Taylor Francis Inc, hlm 7 – 11.

³⁴ *Ibid*, 26 – 27.

³⁵ Robert Jackson dan George Sorensen, *Introduction to International Relations: Theories and Approaches, fifth edition* (Oxford: Oxford University Press, 2013), hlm 73.

³⁶ Barry Buzan dan Richard Little, *Constructivism and International Relation Alexander Wendt and His Critics* (New York: Routledge 2 Park Square, 2006), hlm 57.

and supported by intersubjective practice".³⁷ Pernyataan Wendt tersebut menjelaskan bahwa dunia sosial bukanlah sesuatu yang given, bukan struktur yang berasal secara ilmiah. Hakekat manusia bersifat bebas, terhormat karena dapat menerima dan menolak sistem internasional, dan dapat membentuk sebuah hubungan saling menguntungkan yang berdasarkan pada kesepakatan bersama. Konstruktivisme fokus pada permasalahan bagaimana ide dan gagasan tersebut dibentuk, bagaimana ide dan gagasan tersebut berkembang, dan bagaimana ide dan gagasan tersebut digunakan oleh aktor dalam hubungan internasional untuk menyelesaikan beberapa permasalahan yang dihadapi.

Setelah memahami tentang teori konstruktivisme dan diimplementasikan ke dalam tema tesis mengenai keberhasilan pemerintah Jawa Tengah meningkatkan investasi asing pada tahun 2013 sampai 2016 di Provinsi Jawa Tengah. Ganjar Pranowo sebagai Gubernur Jawa Tengah masa bakti 2013-2018 merupakan salah satu sosok yang memiliki pengaruh yang sangat besar dalam perkembangan dan peningkatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah. Investasi asing bagi Ganjar Pranowo merupakan salah satu variabel selain pajak yang digunakan sebagai cara untuk meningkatkan pemasukan daerah, meningkatkan kesejahteraan penduduk dan menggerakkan roda pembangunan. Jika dikaitkan dengan teori konstruktifisme, Gubernur Ganjar Pranowo ialah salah satu agen atau aktor yang memiliki kreatifitas, ide dan gagasan bagaimana cara mendapatkan pemasukan daerah dengan tidak selamanya mengandalkan dari perolehan pajak daerah melainkan dengan memberikan kesempatan bagi investor asing untuk menanamkan dan mengembangkan modalnya di wilayah Jawa Tengah. Kreatifitas, ide dan gagasan tersebut dituangkan ke dalam bentuk Peraturan Gubernur dan Peraturan Daerah yang berkaitan dengan mekanisme penanaman modal asing di Jawa Tengah. Gubernur Ganjar Pranowo mendukung penuh jika investasi yang dilakukan oleh para investor asing di wilayah Jawa Tengah memberikan keuntungan, jika tidak memberikan keuntungan maka yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo ialah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap birokrasi atau produk regulasi berupa undang-undang yang dinilai menghambat investasi asing.

Sebagai Gubernur Jawa Tengah dan sebagai aktor dalam hubungan internasional dalam kaitannya dengan penanaman modal asing di wilayah pemerintahannya, Ganjar

³⁷ Alexander Wendt, "*Levels of Analysis vs. Agents and Structures: Part III*", *Review of international studies* 18 (1992), 183

Pranowo selalu menjalin koordinasi dengan baik dengan Presiden (Pemerintah Pusat). Ganjar Pranowo selalu memberikan kebebasan dan keleluasaan bagi para investor asing agar nyaman berinvestasi di Jawa Tengah. dalam upaya peningkatan investasi asing di Jawa Tengah selain menjadi aktor, agen dan Gubernur, Ganjar Pranowo bertindak sebagai fasilitator dari pemerintah pusat. Fasilitator disini dapat dipahami sebagai peran Gubernur dalam memfasilitasi keinginan para investor yang terlebih dahulu melakukan kontak dengan pemerintah pusat untuk mempersiapkan lahan di wilayah Jawa Tengah, membuat regulasi yang pro investasi asing dan mempersiapkan para angkatan kerja. Semua yang dilakukan Ganjar Pranowo yang terkait dengan peningkatan investasi asing selalu berdasarkan Undang-Undang yang telah dibuat, disahkan dan disetujui oleh anggota DPRD Jawa Tengah.

G. Hipotesa

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil meningkatkan investasi asing di Jawa Tengah Karena:

1. Progresifnya peraturan daerah dalam menarik investor asing.
2. Mengadaptasi norma investasi asing dengan menggunakan *benchmarking* dari negara lain

H. Metode penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta mengenai kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait dalam masalah investasi pada masa pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo. Dengan menitik beratkan pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

2. Lokasi Dan Jangkauan Penelitian

Untuk menghindari perlebaran penjelasan mengenai kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam penataan kerjasama Internasional khususnya dalam masalah investasi asing. Maka dibutuhkan jangkauan penelitian yang berfungsi untuk memfokuskan penelitian ini. Jangkauan penelitian ini dimulai sejak awal pemerintahan Gubernur Ganjar Pranowo pada tahun 2013. Adapun tempat yang

menjadi lokasi penelitian adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng (DPMPTSP), Bappeda Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kantor Gubernur Jawa Tengah dan BPS Provinsi Jawa Tengah.

I. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam rencana penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder.

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber asalnya, data primer diperoleh melalui :
 - a) Observasi yaitu pengumpulan data dalam kegiatan penelitian yang dilakukan dengan mengamati kondisi yang berkaitan dengan peningkatan investasi asing di wilayah Provinsi Jawa Tengah.
 - b) Interview dan diskusi mendalam (*in dept interview*) yaitu mengadakan diskusi dan interview dengan Staf Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jateng (DPMPTSP), Staf Badan Pusat Statistik (BPS), Staf Gubernur Jawa Tengah, dan Staf Bappeda Provinsi Jawa Tengah yang bertujuan untuk menggali informasi yang lebih mendalam tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan permasalahan penelitian
- b. Data Sekunder adalah data yang telah diolah sebelumnya yang diperoleh dari studi kepustakaan, maupun studi dokumentasi. Adapun data sekunder diperoleh melalui:
 - a) Studi pustaka yaitu bersumber dari hasil bacaan literatur atau buku-buku atau data terkait yang dengan investasi asing di daerah. Ditambah penelusuran data online, dengan pencarian data melalui fasilitas internet.

- b) Dokumentasi adalah data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan sebagainya. Dapat berbentuk arsip-arsip, laporan tertulis atau daftar inventaris yang diperoleh terkait dengan penelitian yang dilakukan. Dokumen tersebut termasuk dengan laporan realisasi investasi asing di Provinsi Jawa Tengah serta undang-undang yang terkait ataupun mendukung tentang peningkatan investasi asing seperti Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah nomor 52 Tahun 2015, nomor 51 Tahun 2012 dan Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2016.

1. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana permasalahan digambarkan berdasarkan fakta-fakta yang ada kemudian dihubungkan antara fakta yang satu dengan fakta yang lainnya, kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi keseluruhan situasi sosial yang diteliti yang meliputi berbagai aspek.

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan dibagi dan di jelaskan menjadi lima bab, yaitu:

Pada bagian Bab I merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah, tujuan penelitian, kontribusi riset, rumusan masalah, studi pustaka, kerangka teori, hipotesa, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Pada bagian Bab II, menjelaskan mengenai perkembangan investasi asing di wilayah Jawa Tengah sebelum Ganjar Pranowo, pada sub bab pertama menjelaskan mengenai perkembangan investasi asing pada masa pemerintahan gubernur Ali Mufiz,

pada sub bab kedua menjelaskan mengenai perkembangan investasi asing pada masa pemerintahan Bibit Waluyo.

Pada bagian Bab III, menjelaskan mengenai perkembangan investasi asing di wilayah Jawa Tengah pada Tahun 2013-2016, pada sub bab pertama menjelaskan mengenai dinamika sosial politik provinsi Jawa Tengah, pada sub bab kedua menjelaskan mengenai potensi-potensi daerah di provinsi Jawa Tengah, pada sub bab ketiga menjelaskan mengenai hambatan dalam investasi asing, pada sub bab keempat menjelaskan mengenai faktor pendukung dalam investasi asing di Jawa Tengah.

Pada bagian Bab IV, menjelaskan mengenai faktor-faktor peningkatan investasi asing oleh pemerintah provinsi Jawa Tengah (2013-2016), pada sub bab pertama menjelaskan mengenai arti penting investasi asing bagi pemerintah Jawa Tengah, pada sub bab kedua menjelaskan mengenai hubungan otonomi daerah dengan investasi asing, pada sub bab ketiga menjelaskan mengenai peningkatan investasi asing di Provinsi Jawa Tengah, pada sub bab keempat menjelaskan mengenai manfaat investasi asing bagi provinsi Jawa Tengah, pada sub bab kelima menjelaskan mengenai review hasil penelitian.

Pada bagian Bab V, menjelaskan mengenai kesimpulan dari keseluruhan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, memberikan sejumlah saran, masukan dan kontribusi bagi pemerintah terkait maupun pihak lainnya dalam upaya meningkatkan investasi asing di daerah.